BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem manajemen informasi objek pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung sudah termasuk baik, ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria baik. Artinya penerapan sistem manajemen informasi objek pajak, yang meliputi pendaftaran, pendataan, penilaian, pemberian identitas objek pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pemantauan penerimaan, penagihan dan pelayanan secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik, namun jika dilihat dari segi kegiatan pendaftaran subjek dan objek pajak yang dilakukan KPP Pratama di wilayah Kota Bandung pada umumnya belum sepenuhnya memenuhi kriteria.
2. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kota Bandung pada tahun 2010 Rp 207.188.630.000 dengan pencapaian target sebesar 77,92%. Realiasasi penerimaan

pajak bumi dan bangunan yang tertinggi diperoleh kantor pelayanan pajak Bandung Bojonagara yaitu sebesar Rp Rp 64.695.700.000 dengan pencapaian target sebesar 80,09% dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah diperoleh kantor pelayanan pajak Bandung Tegallega yaitu sebesar Rp 22.045.550.000 dengan pencapaian target sebesar 72,36%. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Wilayah Bandung belum dikatakan optimal karena nilai realisasi dengan nilai yang ditargetkan belum mecapai 100%.

3. Penerapan sistem manajemen informasi objek pajak pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Kota Bandung berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan arah hubungan positif. Artinya semakin baik penerapan sistem manajemen informasi objek pajak akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem manajemen informasi objek pajak akan menurunkan penerimaan pajak bumi dan banguan. Sebesar 77,7% perubahan pada penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh penerapan sistem manajemen informasi objek pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa penerapan sistem manajemen informasi objek pajak telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Penerapan sistem manajemen informasi objek pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun dalam hal pendaftaran subjek dan objek pajak dan pelaksanaan pemeliharaan basis data harus lebih dtingkatkan sehingga masalah seperti banyak nya data objek pajak yang dianggap sudah kadaluarsa tidak akan terjadi lagi. Proses pemeliharaan ini juga harus di dukung dengan kelengkapan data dan informasi perpajakan serta keakuratan data yang ada.
2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Wilayah Bandung belum sepenuh nya mencapai target. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyetorkan SPPT ini berkaitan dengan sistem pemungutan yang selama ini masih semi antara *self assessment system* dengan *official assessment system*. Alangkah lebih baik jika pihak DJP lebih mempertegas sistem pemungutan apa yang akan digunakan, sehingga wajib pajak tidak bingung antara harus meyetorkan sendiri SPPT nya atau menunggu petugas yang mengambil. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan pihak DJP juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan SPPT.

3. Penerapan sistem manajemen informasi objek pajak sebaiknya lebih diperhatikan lagi, karena keakuratan data subjek dan objek pajak bisa mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan contohnya pada kesalahan nama wajib pajak maupun luas dan letak objek pajak serta masih banyak wajib pajak yang merasa nilai jual objek pajak (NJOP) terlalu tinggi dan tidak sesuai sehingga mereka menuntut pengurangan, atas pengurangan yang diajukan oleh wajib pajak ini dapat berdampak pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.